



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dharma Praja No.1 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
(Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)
Telepon 0511-4770001, 4770002 No. Faksimile 0511-4770008, 4770009
Laman <http://www.kalselprov.go.id>; Pos-el pemprop@kalsel.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 336 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang :
- Bahwa Setiap Orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/094/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi pergantian pejabat struktural dan atau pejabat lainnya, maka pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam PPID Pelaksana.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal : 26 Januari 2026
**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG
DAN JASA,**



Dr. RAHMADDIN MY, A. Ks, M. Si

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku Atasan PPID di Banjarbaru.
2. Yang bersangkutan untuk diketajui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Biro
Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan

Nomor : 336 Tahun 2026
Tanggal : 26 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Pelaksanaa (PPID Pelaksana)

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID
PELAKSANA)**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2.	Ketua	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.	Koordinator Pelayanan dan Informasi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
5.	Koordinator Pelayanan Data dan Informasi	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
6.	Koordinator Pengolah Data dan Sistem Informasi	Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi
7.	Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
8.	Koordinator Pelayanan Informasi Publik Bidang Kelembangan dan SDM	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan dan SDM Pengadaan Barang dan Jasa
9.	Koordinator Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pemantauan dan Evaluasi	Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
10.	Petugas Pelayanan Informasi	Mahbub Junaidi,S.Kom NIP. 19790321 201101 1 001

11.	Petugas Pelayanan Informasi	Hasnurridha, S.Kom NIP. 19890911 201101 2 003
12.	Petugas Pelayanan Informasi	Muhammad Fahrudin NIP. 19771216 199703 1 004
13.	Petugas Pelayanan Informasi	Maulida Hayati, S.Kom NIPPPK. 19990706 202321 2 002
14.	Petugas Pelayanan Informasi	Inez Natselha Shanaztiti, S.Kom. NIPPPK. 19890105 202321 2 038
15.	Petugas Pelayanan Informasi	Adilia Maulida, A.Md NIPPPK. 19970705 202521 2 024

**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG
DAN JASA,**



Dr. RAHMADDIN MY, A. Ks, M. Si